



**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA DENPASAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang dipakai untuk mengambil keputusan serta untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya yang dikelolanya dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan Anggaran;
- b) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar dapat dilihat pada LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas laporan Keuangan (CALK).

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

- (a) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah; (SAP);
- (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- (c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 184 ayat (1) dan (3) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang menyatakan bahwa laporan keuangan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- (d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP) tertanggal 13 Juni 2005;
- (e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- (f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
- (g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya No. 59 Tahun 2007.
- (h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan - penjelasan atas pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan laporan arus kas. Arus kas hanya di buat oleh sekretariat Pemerintah Daerah. Sedangkan laporan yang dibuat masing – masing SKPD adalah LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas laporan keuangan.

Adapun sistematika catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Pencapaian target kinerja Keuangan

Bab III Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

- 3.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 3.2. Neraca

BAB II

PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung Tahun Anggaran 2021. Dana yang dikelola oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar sebesar Rp. 85.669.818.803,00. Yang sampai dengan semester II Tahun 2021 yang telah terealisasi sebesar Rp. 80.275.960.031,72 atau 93,70%

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Tidak terdapat hambatan yang signifikan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Entitas pelaporan adalah entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Adapun entitas akuntansi /entitas pelaporan keuangan Daerah sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 adalah :

1. Belanja Operasi

- Target Keuangan : Rp. 84.414.818.803,00
- Realisasi : Rp. 79.436.843.464,79 (94,10%)
- Sisa Dana : Rp. 4.977.975.338,21

2. Belanja Modal

- Target Keuangan : Rp. 1.255.000.000,00
- Realisasi : Rp. 839.116.566,93 (66.86%)
- Sisa Dana : Rp. 415.883.133,07

Sisa dana yang ada dalam pos belanja langsung yang bersumber dari APBD Kota Denpasar disebabkan karena:

- Sisa dari nilai Pagu Anggaran dengan nilai Penawaran pada proses tender pada Pengadaan Barang jasa,
- Pada kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong tidak terealisasi anggaran belanja modal bangunan tempat kerja (pensertifikatan tanah kosong) yang anggarannya Rp. 105.000.000,00. Adapun alasan tidak terealisasinya anggaran tersebut karena proses pencairan anggaran pensertifikatan yang memadukan antara SIPD dan Sistem (Aplikasi) di Kantor Pertanahan Kota Denpasar memerlukan penyesuaian tersendiri (Sinkronisasi), penyesuaian kode rekening untuk penempatan dan penganggaran biaya pensertifikatan yang harus dijabarkan dan diuraikan dalam suatu kesatuan proses.

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menyelenggarakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Pemerintahan Kota Denpasar, adalah sebagai berikut :

| No | Nama Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Belanja Daerah | | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp. 13.620.542.629,00 | Rp. 12.242.044.096,00 | 89,88 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| 2 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp. 12.665.928,00 | Rp. 12.636.834,00 | 99,77 |
| 3 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp. 92.492.400,00 | Rp. 91.343.600,00 | 98,76 |
| 4 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Rp. 220.958.554,00 | Rp. 215.160.110,00 | 97,38 |
| 5 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp. 37.680.000,00 | Rp. 28.008.000,00 | 74,33 |
| 6 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Rp. 42.825.000,00 | Rp. 42.819.250,00 | 99,99 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| 7 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Rp. 252.000.000,00 | Rp. 62.081.853,00 | 24,64 |
| 8 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp. 1.966.432.080,00 | Rp. 1.947.682.080,00 | 99,05 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| 9 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp. 15.740.000,00 | Rp. 10.272.900,00 | 65,27 |
| 10 | Pemeliharaan Mebel | Rp. 6.400.000,00 | Rp. 4.950.000,00 | 77,34 |
| 11 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp. 248.235.796,00 | Rp. 225.998.544,00 | 91,04 |
| 12 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Rp. 82.425.000,00 | Rp. 81.618.200,00 | 99,02 |
| | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | | | |
| 13 | Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Rp. 54.197.600,00 | Rp. 52.514.600,00 | 96,89 |
| | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | | | |
| 14 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Rp. 868.008.000,00 | Rp. 550.142.066,93 | 63,38 |
| 15 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | Rp. 213.000.000,00 | Rp. 208.719.500,00 | 97,99 |
| | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| 16 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Rp. 805.875.000,00 | Rp. 800.587.500,00 | 99,34 |
| | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | | |

| | | | | |
|---------------------|--|------------------------------|------------------------------|--------------|
| 17 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Rp. 55.017.455.399,00 | Rp. 52.388.070.357,42 | 95,22 |
| | <i>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | |
| 18 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 6.541.600,00 | Rp. 5.266.600,00 | 80,51 |
| | <i>Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</i> | | | |
| 19 | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | Rp. 115.170.200,00 | Rp. 7.245.200,00 | 6,29 |
| | <i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</i> | | | |
| 20 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | Rp. 9.335.937.217,00 | Rp. 8.953.944.040,00 | 95,91 |
| | <i>Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</i> | | | |
| 21 | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Rp. 2.655.236.400,00 | Rp. 2.344.854.700,37 | 88,31 |
| JUMLAH | | Rp. 85.669.818.803,00 | Rp. 80.275.960.031,72 | 93,70 |
| TOTAL JUMLAH | | Rp85.669.818.803,00 | Rp. 80.275.960.031,72 | 93,70 |

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.1.1 Pagu Dana

Jumlah Anggaran Tahun 2021 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar sebesar Rp. 85.669.818.803,00 dan sampai dengan semester II telah terealisasi sebesar Rp. 80.275.960.031,72 atau 93,70%

Rincian atas anggaran belanja adalah sebagai berikut :

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | | (%) |
|----|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------|
| | | | Jumlah | Bobot(%) | |
| 1 | Belanja Operasi | 84.414.818.803,00 | 79.436.843.464,79 | 92,72 | 94,10 |
| 2 | Belanja Modal | 1.255.000.000,00 | 839.116.566,93 | 0,98 | 66,86 |
| | J U M L A H | 85.669.818.803,00 | 80.275.960.031,72 | | 93,70 |

Belanja Operasi dan Belanja Modal secara terperinci adalah sebagai berikut :

3.1.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan pagu anggaran sebesar Rp.13.623.542.629,00 realisasi pengeluaran sampai dengan Semester II Tahun 2021 sebesar Rp.12.242.044.096 atau 89,88%.

Dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian | Anggaran | Realisasi | | % |
|-----|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|--------------|
| | | | Jumlah | Bobot % | |
| | Belanja Operasi | | | | |
| 1 | Gaji dan Tunjangan | 6.135.290.207,00 | 5.570.238.485,00 | 40,90 | 90,79 |
| 2 | Tambahan Penghasilan PNS | 7.485.252.422,00 | 6.671.805.611,00 | 48,98 | 89,13 |
| | Jumlah I | 13.620.542.629,00 | 12.242.044.096,00 | | 89,88 |
| 1 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100 | 100 |
| | Jumlah II | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100 | 100 |
| | Jumlah I +II | 13.623.542.629,00 | 12.245.044.096,00 | | 89,88 |

3.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp.12.611.296.775,00 realisasi pengeluaran sampai dengan Semester II Tahun 2021 adalah sebesar Rp.11.910.148.741,00 atau 94,42%.

Dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % |
|-----------|---|----------------------|----------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Belanja Operasi | | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | - | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| 2 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp. 12.665.928,00 | Rp. 12.636.834,00 | 99,77 |
| 3 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp. 92.492.400,00 | Rp. 91.343.600,00 | 98,76 |
| 4 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Rp. 220.958.554,00 | Rp. 215.160.110,00 | 97,38 |
| 5 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp. 37.680.000,00 | Rp. 28.008.000,00 | 74,33 |
| 6 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Rp. 42.825.000,00 | Rp. 42.819.250,00 | 99,99 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| 7 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Rp. 252.000.000,00 | Rp. 62.081.853,00 | 24,64 |
| 8 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp. 1.966.432.080,00 | Rp. 1.947.682.080,00 | 99,05 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| 9 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp. 15.740.000,00 | Rp. 10.272.900,00 | 65,27 |
| 10 | Pemeliharaan Mebel | Rp. 6.400.000,00 | Rp. 4.950.000,00 | 77,34 |
| 11 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp. 248.235.796,00 | Rp. 225.998.544,00 | 91,04 |
| 12 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Rp. 82.425.000,00 | Rp. 81.618.200,00 | 99,02 |
| | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | | | |
| 13 | Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Rp. 54.197.600,00 | Rp. 52.514.600,00 | 96,89 |
| | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | | | |
| 14 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Rp. 18.008.000,00 | Rp. 9.003.000,00 | 49,99 |
| 15 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | Rp. 213.000.000,00 | Rp. 208.719.500,00 | 97,99 |
| | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| 16 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Rp. 10.875.000,00 | Rp. 9.107.500,00 | 83,75 |

| | | | | |
|---------------|--|------------------------------|------------------------------|--------------|
| | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | | |
| 17 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Rp. 182.476.000,00 | Rp. 135.638.030,00 | 74,33 |
| | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| 18 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 6.541.600,00 | Rp. 5.266.600,00 | 80,51 |
| | Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong | | | |
| 19 | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | Rp. 10.170.200,00 | Rp. 7.245.200,00 | 71,24 |
| | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | | | |
| 20 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | Rp. 9.135.937.217,00 | Rp. 8.755.086.540,00 | 95,83 |
| | Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | | | |
| 21 | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Rp. 5.236.400,00 | Rp. 4.996.400,00 | 95,42 |
| JUMLAH | | Rp. 12.611.296.775,00 | Rp. 11.910.148.741,00 | 94,42 |

3.1.2.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah dengan anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp.57.384.979.399,00 realisasi pengeluaran sampai dengan Semester II Tahun 2021 adalah sebesar Rp.54.493.170.627,79 atau 94,96%. Dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % |
|-----------|--|----------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Belanja Operasi | | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | - | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| 2 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| 3 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| 4 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| 5 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| 6 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| 7 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| 8 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |

| | | | | |
|---------------|---|------------------------------|-----------------------------|--------------|
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| 9 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| 10 | Pemeliharaan Mebel | | | |
| 11 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| 12 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | |
| | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | | | |
| 13 | Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | | | |
| | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | | | |
| 14 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | | | |
| 15 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | | | |
| | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| 16 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | | | |
| | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | | |
| 17 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Rp. 54.734.979.399,00 | Rp. 52.153.312.327,42 | 95,28 |
| | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| 18 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong | | | |
| 19 | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | | | |
| | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | | | |
| 20 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | | | |
| | Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | | | |
| 21 | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Rp. 2.650.000.000,00 | Rp. 2.339.858.300,37 | 88,30 |
| JUMLAH | | Rp. 57.384.979.399,00 | Rp.54.493.170.627,79 | 94,96 |

3.1.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dengan anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 795.000.000,00 realisasi pengeluaran sampai dengan Semester II Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 791.480.000,00 atau 99,56%. Dengan rincian sebagai berikut

| No | Nama Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Belanja Operasi | | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | - | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| 2 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| 3 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| 4 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| 5 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| 6 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| 7 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| 8 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| 9 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| 10 | Pemeliharaan Mebel | | | |
| 11 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| 12 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | |
| | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | | | |
| 13 | Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | | | |
| | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | | | |
| 14 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | | | |
| 15 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | | | |
| | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| 16 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Rp. 795.000.000,00 | Rp. 791.480.000,00 | 99,56 |
| | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | | |
| 17 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | | | |
| | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| 18 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |

| | | | | |
|---------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------|
| | <i>Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</i> | | | |
| 19 | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | | | |
| | <i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</i> | | | |
| 20 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | | | |
| | <i>Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</i> | | | |
| 21 | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH | | | |
| JUMLAH | | Rp. 795.000.000,00 | Rp.791.480.000,00 | 99,56 |

3.1.2.5 Belanja Modal

Belanja Modal dengan pagu anggaran Tahun 2021 sebesar Rp.1.255.000.000,00 realisasi pengeluaran sampai dengan Semester II Tahun 2021 sebesar Rp. 839.116.566,93 atau 66,86% Rincian belanja modal Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

| No | NamaKegiatan | Anggaran | Realisasi | % |
|-----------|--|----------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | <i>Belanja Operasi</i> | | | |
| | <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | | | |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | - | |
| | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | | | |
| 2 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| 3 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| 4 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| 5 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| 6 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | |
| | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | | |
| 7 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| 8 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| | <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | | |
| 9 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| 10 | Pemeliharaan Mebel | | | |
| 11 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| 12 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | |

| | | | | |
|---------------|---|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| | <i>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</i> | | | |
| 13 | Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | | | |
| | <i>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</i> | | | |
| 14 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Rp. 850.000.000,00 | Rp. 541.139.066,93 | 63,66 |
| 15 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | | | |
| | <i>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | |
| 16 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | | | |
| | <i>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i> | | | |
| 17 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Rp. 100.000.000,00 | Rp. 99.120.000,00 | 99,12 |
| | <i>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | |
| 18 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | <i>Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</i> | | | |
| 19 | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | Rp. 105.000.000,00 | - | |
| | <i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</i> | | | |
| 20 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | Rp. 200.000.000,00 | Rp. 198.857.500,00 | 99,43 |
| | <i>Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</i> | | | |
| 21 | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH | | | |
| JUMLAH | | Rp. 1.255.000.000,00 | Rp.839.116.566,93 | 66,86 |

Belanja Modal secara terperinci adalah sebagai berikut :

a. Tanah

Belanja Tanah dengan Pagu anggaran Tahun 2021 sebesar Rp.105.000.000,00 tidak dapat terealisasi karena proses pencairan anggaran pensertifikatan yang memadukan antara SIPD dan Sistem (Aplikasi) di Kantor Pertanahan Kota Denpasar memerlukan penyesuaian tersendiri (Sinkronisasi), penyesuaian kode rekening untuk penempatan dan penganggaran biaya pensertifikatan yang harus dijabarkan dan diuraikan dalam suatu kesatuan proses.

b. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin sampai dengan semester II Tahun 2021 tidak dianggarkan

c. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan dengan Pagu anggaran Tahun 2021 sebesar Rp.300.000.000,00 realisasi pengeluaran sampai dengan Semester II Tahun 2021 sebesar Rp.297.977.500,00

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan Pagu anggaran Tahun 2021 sebesar Rp.850.000.000,00 realisasi sampai dengan Semester II Tahun 2021 sebesar Rp.541.139.066,93.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya sampai dengan semester II Tahun 2021 tidak dianggarkan

f. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Belanja Kontruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan semester II Tahun 2021 tidak ada

3.2 NERACA

3.2.1. ASET

1. ASET LANCAR

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,00

Jumlah tersebut merupakan keadaan Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar pada tanggal 31 Desember 2021. Nilai Persediaan (Persediaan Pakai Habis) per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.1.520.000,00 yang terdiri dari :

| | | |
|----------------------|------------|---------------------|
| a. Alat Tulis Kantor | Rp | 120.000,00 |
| b. BBM | <u>Rp.</u> | <u>1.400.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. | 1.520.000,00 |

2. ASET TETAP

Aset tetap Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar terdiri dari Tanah, Peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya. Nilai Aset tetap per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 103.317.862.982,43

Ringkasan aset per 31 Desember 2021 tetap sebagai berikut :

a. Tanah

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Saldo Awal per 1 Januari 2021 | Rp. 78.750.000,00 |
| Mutasi Tambah Aset 2021 | Rp. <u>33.166.036.000,00</u> |
| Saldo Akhir Per31 Desember 2021 | Rp. 33.244.816.000,00 |

b. Peralatan dan Mesin

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Saldo Awal per 1 Januari 2021 | Rp. .17.293.680.363,68 |
| Mutasi Tambah Aset 2021 | Rp. _____ |
| Saldo Akhir Per 31 Desember 2021 | Rp. 17.293.680.363,68 |

c. Gedung dan Bangunan

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Saldo Awal per 1 Januari 2021 | Rp. 30.208.313.425,83 |
| Mutasi Kurang Aset 2021 | Rp. <u>151.372.625,15</u> |
| Saldo Akhir Per 31 Desember 2021 | Rp. 30.056.940.800,68 |

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Saldo Awal per 1 Januari 2021 | Rp. 11.236.191.360,49 |
| Mutasi Tambah Aset 2021 | Rp. <u>601.774.192,93</u> |
| Saldo Akhir Per31 Desember 2021 | Rp. 11.837.965.553,42 |

e. Aset Tetap Lainnya

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Saldo Awal per 1 Januari 2021 | Rp. 37.749.027.193,50 |
| Mutasi Tambah Aset 2021 | Rp. <u>303.099.925,15</u> |
| Saldo Akhir Per 31 Desember 2021 | Rp. 38.052.127.118,65 |

f. Konstruksi dalam pengerjaan

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Saldo awal 1 Januari 2021 | Rp. 1.014.250.000,00 |
| Mutasi Tambah Aset | Rp. <u>99.120.000,00</u> |
| Saldo Akhir Per 31 Desember 2021 | Rp. 1.113.370.000,00 |

g. Aset Lainnya

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Saldo awal 1 Januari 2021 | Rp. 425.804.710,00 |
| Mutasi Tambah Aset | Rp. _____ |
| Saldo Akhir Per 31 Desember 2021 | Rp. 425.804.710,00 |

3.3. SALDO KAS

Saldo Kas per 31 Desember 2021 terdiri dari :

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Saldo Giro | Rp. 0,00 |
| Saldo Kas/Tunai | Rp. 0,00 |
| Saldo Akhir per 31 Desember 2021 | <u>Rp. 0,00</u> |

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
Dan Pertanahan Kota Denpasar



Gede Narendra
Pembina Utama muda
NIP. 19620223 199203 1 005